

REFORMASI_BIROKRASI- PROSIDING_UNSA.docx

by

Submission date: 18-May-2020 12:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1326772282

File name: REFORMASI_BIROKRASI-PROSIDING_UNSA.docx (23.19K)

Word count: 3019

Character count: 20881

REFORMASI BIROKRASI DAN TUNTUTAN PROFESIONALISME

Winarti

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
winartitik@yahoo.co.id

Dr. Budiman Widodo M.Si

Dosen ASMI UNSA Surakarta
budimanwidodo5@gmail.com

PENGANTAR

⁹ Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut mental aparatur akuntabilitas pengawasan kelembagaan tatalaksana sumber daya manusia aparatur peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Tantangan pemerintah untuk ²³ mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik setelah tumbangny⁷ rejim Orde Baru sehingga reformasi birokrasi merupakan pilihan yang tepat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cita-cita reformasi.

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi efektifitas dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai payung hukum Pelaksanaan Reformasi ⁶ Birokrasi. Dan semakin kuat dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Reformasi sebuah istilah yang sangat populer setelah adanya gerakan pelengseran era Orde Baru pada bulan Mei 1998 masih membekas dihati bangsa Indonesia. Sebuah gerakan yang dilandasi semangat untuk menata kembali fungsi-fungsi lambaga negara yang dinilai tersumbat dan terjadi banyak penyimpangan fungsi. Sepuluh tahun gerakan reformasi telah berjalan banyak pendapat yang berkembang ada penilaian reformasi telah mati suri alias tidak berdaya sama sekali namun ada pendapat yang mengatakan reformasi

telah menuai hasil-hasil positif atau bahkan ada yang menilai reformasi keablasan yang membuat bangsa Indonesia kian terpuruk alias terjadi kemerosotan di berbagai bidang seperti ekonomi politik dan diplomasi internasional. Pertanyaan yang menarik adalah mengapa reformasi birokrasi itu penting ?

REFORMASI BIROKRASI

² Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

⁶ Reformasi birokrasi menurut Prof. Sutarto Hadi dapat diterjemahkan sebagai upaya kita semua (khususnya badan publik) untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau dapat disebut *good Governace* (<https://ulm.ac.id>).

Latar belakang terjadinya reformasi birokrasi juga dapat dilihat karena dari beberapa kondisi seperti :

- ⁵ 1. Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini
2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik.
3. Tingkat efisiensi efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah.
4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah yang masih rendah.
5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

²¹ Perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti tuntutan akan pelayanan publik yang baik cepat dan tepat menjadi tantangan birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan jawaban terhadap tantangan tersebut karena reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang sifatnya mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Kelembagaan Tatalaksana SDM Aparatur Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik.

¹³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memprioritaskan enam kegiatan pokok pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional. Keenam kegiatan tersebut adalah :

3. Menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju smart ASN.
2. Mengakselerasi penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
5. Melanjutkan penataan kelembagaan instansi pemerintah agar fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan lincah efektif dan efisien.
6. Mengakselerasi perbaikan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha. (<https://nasional.kompas.com>)

1. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam 4 rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar komprehensif dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

2. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Sedangkan reformasi birokrasi sendiri menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi efektifitas dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.

Birokrasi harus baik karena birokrasi yang baik akan menciptakan Good Governance ada tiga hal yang hendak diraih yaitu Transparansi akuntabilitas dan partisipasi. Ketiga hal tersebut hanya ada pada sebuah negara yang demokratis yang pada hakekatnya tidak akan dapat terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat sipil. Yang dimaknai sebagai tempat warga negara mengembangkan diri secara swadaya dan bebas dari kendali negara yang melembaga melalui berbagai hak dan

berhadapan dengan negara namun eksistensinya di jamin dan dihargai oleh negara (Mas'ud: 2003).

Ada tiga model masyarakat sipil yang dikembangkan pertama model Eropa Timur dimana orientasi masyarakat sipil adalah pada menentang negara atau paling tidak berusaha membatasi peran negara yang otoriter dan dominan kedua model Bank Dunia yang lebih menekankan pada pemangkasan peran negara atau berusaha meminimalisir peran negara ketiga model Pluralis merupakan sarana mengembangkan demokrasi dan memelihara kultur demokratik dimana masyarakat sipil merupakan penjamin stabilitas demokrasi pencegah dominasi satu kelompok terhadap kelompok minoritas tujuan utama pada model ini adalah bagaimana membuat negara lebih bertanggung jawab secara demokratis terhadap rakyatnya dan menggalakkan partisipasi masyarakat seluas mungkin dalam proses governance pada model ini juga ditekankan pada sifat pluralisme yang tidak memandang RAS etnik umur gender dan status ekonomi.

Melihat hakikat inti dari uraian diatas bahwa 'Good Governance' adalah sebuah proses menuju negara yang demokratis dimana dalam membuat kebijakan negara melibatkan pilar yakni pemerintah Stake Holder dan masyarakat. Bagi Indonesia memerlukan proses yang panjang mengingat setelah era 32 th didominasi oleh kekuasaan pemerintah (mayoritas tunggal) saat ini sedang pada tahapan transisional pergeseren menuju ke arah Good Governance telah mulai nampak. Namun yang menjadi persoalan (kendala) adalah sinergi dari ketiga pilar tersebut diatas pada tataran partisipasi masyarakat baru sebatas konsep belum menyentuh substansi seperti dalam tataran struktur telah dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (untuk Kota) dan Badan perwakilan Desa (untuk Desa) namun dalam prakteknya kedua lembga tersebut tidak mampu menyalurkan aspirasi warganya. Kemudian pada tataran konsep masih terkendala pada lemahnya pemahaman Good Governance itu sendiri. Ditambah kemampuan skill baik ditingkat masyarakat maupun lembaga yang ada masih lemah.

Dalam banyak kasus sering dijumpai ketidak siapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah seperti dalam pembagian dana Block Grant yang terkesan hanya bagi-bagi duit namun dalam aplikasinya pemanfaatan dana tersebut hanya asal-asalan. Hal ini terjadi karena tidak dilandasi oleh alasan yang kuat dalam sebuah proyek pembangunan yang tidak berdasar pada skala prioritas kebutuhan. Demikian halnya yang terjadi pada pelibatan masyarakat dalam pembangunan melalui "MUSKELBANG" (Musyawarah Kalurahan Membangun) yang tidak merupakan "Representasi" dari masyarakat luas namun hanya merupakan perwakilan dari RT yang nota bene hanya merupakan kepanjangan dari Birokrasi. Muskelbang hanya merupakan cerminan demokrasi prosedural bukan pada tataran demokrasi yang substansial.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pelaksanaan “Good Governance” memerlukan beberapa syarat bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri sejauh mana masyarakat dapat mengaktualisasikan diri dalam proses pengambilan kebijakan meskipun diakui bahwa ada kemajuan dalam menuju “Good Governance” namun usaha keras perlu dilakukan agar Good Governance benar-benar dapat diterapkan di implementasikan ke dalam kehidupan masyarakat bernegara. Karena pada hakikatnya dalam era globalisasi ini dunia internasional mensyaratkan implementasi Good Governance atau dengan kata lain Indonesia tidak dapat menghindarinya bahwa Good Governance adalah merupakan kebutuhan di era globalisasi ini. Dalam konteks negara Indonesia good governance dilakukan melalui reformasi Birokrasi.

Pada saat ini beberapa Kabupaten dan Kota sedang fokus mempersiapkan²⁰ Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Pada dasarnya PP No. 41 tahun 2007 tersebut dibuat dilandasi semangat untuk melakukan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Reformasi sebuah istilah yang sangat populer setelah adanya gerakan pelengseran era Orde Baru pada bulan Mei 1998 masih membekas dihati bangsa Indonesia. Sebuah gerakan yang dilandasi semangat untuk menata kembali fungsi-fungsi lembaga negara yang dinilai tersumbat dan terjadi banyak penyimpangan fungsi. Sepuluh tahun gerakan reformasi telah berjalan banyak pendapat yang berkembang ada penilaian reformasi telah mati suri alias tidak berdaya sama sekali namun ada pendapat yang mengatakan reformasi telah menuai hasil-hasil positif atau bahkan ada yang menilai reformasi kebablasan yang membuat bangsa Indonesia kian terpuruk alias terjadi kemerosotan di berbagai bidang seperti ekonomi politik dan diplomasi internasional.

Terlepas dari pro dan kontra gerakan reformasi adalah sebuah tuntutan kebutuhan perkembangan jaman baik itu secara nasional maupun global. Perubahan yang demikian luar biasa dalam kehidupan dan tatanan bangsa yang kian mengglobal menuntut akan adanya perubahan disegala bidang dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika yang ada. Kebutuhan yang berupa pelayanan akan barang-barang publik (*public goods*) kian meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak orang yang memperebutkan barang-barang publik yang sangat terbatas jumlahnya. Sudah menjadi pandangan yang biasa jika banyak orang yang memperebutkan tempat tinggal kesempatan kerja fasilitas transportasi ruang untuk kegiatan sosial dan kebutuhan akan fasilitas umum lainnya. Adalah menjadi fungsi dan tugas dari negara untuk memenuhi kebutuhan warganya. Sebuah teori tentang peran negara menyatakan bahwa peran negara mencakup tiga aspek yaitu fungsi produksi distribusi dan keamanan. Ketersediaan barang-barang publik akan tercover bila

ketiga fungsi tersebut berjalan normal. Sebuah beban berat yang harus dipikul oleh sebuah negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ini harus dipikul oleh negara peran elemen masyarakat yang lain sangat dibutuhkan. Seorang pakar kebijakan publik David T Osborn melontarkan ide yang terkenal dengan "*Reinventing government*" dengan konsep pemikiran pelibatan tiga pilar pemerintahan yakni birokrasi masyarakat dan stake holder. Pada era sebelumnya pemerintahan (*Government: G*) didominasi oleh kekuatan birokrasi namun dalam perkembangannya dewasa ini *Government : G* tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa peran serta dua pilar yang lain yaitu masyarakat dan pengguna (*user*). Terjadinya sinergi antar tiga pilar adalah tuntutan sebuah negara modern yang berprinsip pada sebuah konsep negara demokratis yang menjadi tren negara-negara dewasa ini dengan sebuah konsep bangunan teori yang dikenal dengan sebutan "*Good Governance*".

Tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian kompleks adalah mustahil bila semua harus dibebankan pada negara. Adalah Leonid Bresnev Presiden Uni Soviet ketika itu yang mempopulerkan gerakan "*Glasnot*" atau "*prestorika*". Gerakan ini didasari pada memberikan peran yang lebih besar pada masyarakatnya maupun pada negara-negara bagian yang ketika itu bentuk negara adalah "Uni" dengan paham sosialis yang menjadi tulang punggung bagi negara-negara kawasan Eropa Timur saat itu. Dengan adanya gerakan "*prestorika*" menjadi simbol runtuhnya "*Stalinisme*" yang menjadi paham kuat dan menandai berakhirnya perang dingin dengan negara-negara sekutu.

Konsep "*Good Governance*" menjadi tren negara-negara dibelahan dunia lain termasuk Indonesia. Dengan kunci pelibatan tiga pilar birokrasi masyarakat dan stake holder. Paradigma *good governance* menjadi ciri di era pemerintah orde reformasi yang menjadikan tuntutan akan pemerintahan yang bersih (*clean*) transparan dan akuntabel meskipun konsep ini masih memerlukan proses waktu untuk menuju ke pemerintahan yang ideal.

Usaha ke arah *good governance* ditandai adanya komitmen untuk terus "mereformasi diri" dalam rangka pemenuhan akan pelayanan publik. Di bidang politik reformasi ini lebih terasa sekali dengan munculnya partai-partai politik peserta pemilu serta dilakukan pemilihan Presiden secara langsung sampai ditingkat daerah dengan adanya pemilihan Gubernur Walikota/Bupati secara langsung. Kemudian dibidang ekonomi telah dibukanya keran "privatisasi" yang dimaksudkan untuk memberikan akses masyarakat terhadap perusahaan BUMN atau masuknya sektor privat pada bidang-bidang yang dulu dikuasai (monopoli) oleh negara. Namun kenyataannya hanya pemodal kuat yang mampu masuk baik swasta nasional maupun asing sehingga privatisasi terkesan penjualan aset negara kepada pihak asing. Dibidang pertahanan nampak reformasi yang dilakukan oleh militer dan "kepolisian". Seperti penghapusan badan-badan keamanan yang bersiat represif.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan lain-lain. Selanjutnya di bidang pemerintahan adanya semangat untuk melakukan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi mempunyai tingkat kompleksitas dan kerumitan yang tinggi. Hingga saat ini reformasi birokrasi terkesan jalan ditempat berjalan lebih lambat dibanding reformasi dibidang politik ekonomi dan keamanan. Secara substansial reformasi birokrasi ditandai “*netralitas*” birokrasi dengan politik. Hal ini dimaksudkan menghindari terjadinya politisasi birokrasi yang menempatkan birokrasi menjadi mesin politik dapat dieleminir. Kemandirian birokrasi telah terwujud namun bagaimana peran birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel dapat diwujudkan? Sejauh mana hasil-hasil yang telah dicapai oleh birokrasi dalam memenuhi pelayanan publik ?

BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Profesionalitas seakan menempati prioritas yang rendah dalam penempatan personil dalam susunan organisasi tata kerja. Usaha menuju ke arah profesionalitas telah dilakukan dengan melakukan semisal uji kompetensi namun substansi dari makna profesionalitas adalah sebuah proses panjang yang memerlukan suport dari berbagai pihak. Langkah-langkah usaha kearah perbaikan kualitas pelayanan publik selama ini masih bersifat normatif. Semisal senioritas kepangkatan pengalaman loyalitas dan sebagainya. Parameter yang mengukur *performace* atau *Achievement* (prestasi) seorang pejabat dalam penempatan personil pada SOTK tidak nampak. Bukan mengecilkan arti dan peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) indikator prestasi seorang yang akan menduduki jabatan terbentur pada kriteria baku seperti diuraikan diatas.

Pemikiran yang perlu dipertimbangkan menuju profesionalisme adala dimulai dari awal atau proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Upaya menjaring tenaga-tenaga muda potensial dari daerah melalui proses seleksi kerja sama dengar perguruan tinggi yang memiliki reputasi perlu digalang dengan mengikat bibit-bibit unggul daerah yang berprestasi menonjol perlu dilakukan misalnya menyediakan dana pendidikan (beasiswa) bagi putra-putri daerah untuk mengambil program studi pada perguruan-perguruan tinggi terkemuka yang mempunyai program studi unggulan sesuai kebutuhan daerah. Kepada mereka diproyeksikan sebagai tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan untuk jabatan-jabatan yang sifatnya fungsional bukan struktural.

Perencanaan karier yang profesional perlu menjadi alternatif. Rekrutmen atas dasar “*merit system*” sudah saatnya untuk dikedepankan bagi jabatan-jabatan strategis mengingat tuntutan perkembangan jaman yang sangat kompleks dinamika masalah yang terus berkembang semakin rumit. Jawabnya adalah pegawai yang mampu menjawab tantangan jaman. Solusinya adalah menempatkan personel dengan

parameter/indikator atas dasar “performance” yang dimiliki bukan pada ketentuan normatif semata meskipun *rule of law* perlu dibuat dan ditegakkan. Dengan demikian persaingan antar mereka lebih bersifat skill bukan sekedar senioritas.

Perpaduan senioritas dan *merit system* seakan menjadi dua hal yang sulit dilakukan hanya ini perlu waktu proses yang cukup. Mengkondisikan senioritas yang mempunyai skill atau ditunjang *achievement* (prestasi) tidaklah semudah membalik telapak tangan. Namun demikian dibutuhkan “*good will*” ada kemauan ke arah itu tidak? Praktek-praktek penyesuaian ijazah dalam hal kepangkatan perlu dikaji ulang karena hal ini hanya bersifat legalitas berorientasi pada gelar saja bukan pada kemampuan. Tambahnya gelar pegawai tidak paralel dengan atau disertai peningkatan skill. Seleksi peningkatan kemampuan skill melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas dasar kesesuaian kebutuhan jabatan baik itu melalui melalui pendidikan kedinasan maupun pendidikan umum maka peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar terarah.

Banyak faktor yang mempengaruhi efisien dan efektifnya birokrasi dalam melaksanakan tugas salah satunya adalah tidak profesionalnya aparatur pemerintah dalam menjalankan tupoksinya. Ketidak profesional⁸nya aparatur pemerintah sangat dapat dirasakan dalam urusan pelayanan publik. Menurut Siagian (2000:164) faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur yang profesional antara lain lebih disebabkan profesionalisme aparatur sering terbentur dengan tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia birokrasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan.

Aparatur pemerintah bekerja berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bersifat kaku dan lebih menunggu diperintah dari pada inisiatif sendiri. Kondisi seperti ini peran pimpinan sangat penting untuk memberikan arahan dan melakukan pemberdayaan/lebih memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil *discretion* dalam menghadapi persoalan-persoalan pekerjaan sehingga pekerjaan/tugas bisa segera terselesaikan.

Selain itu pendapat¹ Tjokrowinotono (1996:193) menyatakan bahwa: Profesionalisme tidak hanya cukup dibentuk dan dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan agar aparat dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien akan tetapi juga turut dipengaruhi oleh filsafat-birokrasi tata-nilai struktur dan prosedurkerja dalam birokrasi.

Profesionalitas birokrasi tidaklah adil bila dibandingkan dengan sektor privat yang mempunyai target (orientasi) profit. Salah satu ciri birokrasi ala Weber adalah bahwa birokrasi bersifat hirarkis tidak flexible. Hal inilah yang menjadi kendala bagi “birokrasi”. Namun demikian antara “*profesionalisme*” dan “birokrasi” bukanlah ibarat antara kutub utara dan kutub selatan. Dengan semangat “*reinventing government*” mewirasahakan birokrat pada era otonomi daerah saat ini dan dimasa mendatang

adalah merupakan sebuah tuntutan perkembangan jaman yang serba global. Bila kita tidak ingin semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

Hakikat dari pada Good Governance tidak sebatas pemerintahan (Government) yang baik akan tetapi merupakan sebuah usaha bagaimana dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah melibatkan tiga pilar sekaligus yakni Pemerintah Dunia Usaha dan masyarakat yang ujung-ujungnya adalah bagaimana menciptakan Civil Society dengan ditandai kehidupan masyarakat yang demokratis.

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi muncul karena adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang dirasa belum seperti yang diharapkan organisasi birokrasi yang terserang Patologi seperti; korupsi kolusi dan nepotisme menambah carut marutnya kondisi birokrasi di Indonesia. Harapan dengan diberlakukannya reformasi birokrasi adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik "Good Governance" menjadi tren negara-negara dibelahan dunia lain termasuk Indonesia. Dengan kunci pelibatan tiga pilar birokrasi masyarakat dan stake holder. Paradigma *good governance* menjadi ciri di era pemerintah orde reformasi yang menjadikan tuntutan akan pemerintahan yang bersih (*clean*) transparan dan akuntabel meskipun konsep ini masih memerlukan proses waktu untuk menuju ke pemerintahan yang ideal.

Untuk tercapainya "Good Governance" dan melalui gerakan reformasi birokrasi maka birokrasi dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perubahan *mind set* para birokrat tidaklah seperti membalikkan kedua telapak tangan karena reformasi birokrasi menyangkut perilaku dan budaya organisasi yang dalam realitanya sudah bertahun-tahun lamanya tidak terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* Yogyakarta Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Mohammad Thahir Haning; Reformasi Birokrasi di Indonesia : Tjauan dari Perspektif Administrasi Publik; Jurnal analisis kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 No. 1 Juni 2018.
- Osborne David & Gaebler Ted 1992 *Mewirusahaakan Birokrasi* (terjemahan) PPM Jakarta
- Rasul I. & Rogger D. (2017) *Management of Bureaucrats and Public Service Delivery: Evidence from the Nigerian Civil Service. Economic Journal*. [Online].
- Siagian Sondang P 1994 *Patologi Birokrasi* Galia Indonesia Jakarta

Sutarto Hadi. (2018); Delapan (8) Perubahan Reformasi Birokrasi; <https://ulm.ac.id>.

Diakses tanggal 23 Juli 2019. Pkl. 22.10'

15

Tjokrowinoto Muljarto 1996 *Pembangunan Dilema dan Tantangan Pustaka Pelajar*
Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025 sebagai payung hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.



ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

5%

2

basarnas.go.id

Internet Source

4%

3

tadalafil-20mg-lowestprice.mobi

Internet Source

3%

4

erickpratama108.blogspot.com

Internet Source

3%

5

www.dilmulti-jakarta.go.id

Internet Source

2%

6

www.balitbangham.go.id

Internet Source

2%

7

Submitted to Universitas Krisnadwipayana -
Faculty of Administration

Student Paper

2%

8

thesis.umy.ac.id

Internet Source

1%

9

rb.pom.go.id

Internet Source

1%

10

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY

Student Paper

1%

11

riaveriani.multiply.com

Internet Source

1%

12

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

13

nasional.kompas.com

Internet Source

1%

14

pt.scribd.com

Internet Source

1%

15

Submitted to University of Malaya

Student Paper

<1%

16

faktacirebon.blogspot.com

Internet Source

<1%

17

aksel-tech.blogspot.com

Internet Source

<1%

18

bkdsamarinda.web.id

Internet Source

<1%

19

es.scribd.com

Internet Source

<1%

20

doctiktak.com

Internet Source

<1%

21 Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta <1%
Student Paper

22 Submitted to Universitas Negeri Makassar <1%
Student Paper

23 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung <1%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On